

**SKRIPSI**

**HANNY OLIVIA**

**PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI  
(KASUS SYAMSUDDIN)**



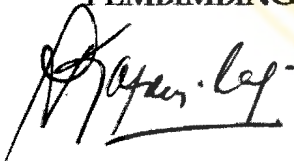
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI  
(Kasus Syamsuddin)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUH  
SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM**

**PEMBIMBING,**



**(LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum.)**  
**NIP.130531799**

**PENYUSUN,**



**(HANNY OLIVIA)**  
**NIP. 03 98 44771**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

## BAB IV

### PENUTUP

#### *1. Kesimpulan*

> Dalam Hukum Islam, Nikah Sirri diakui, walaupun dalam perkawinan itu sendiri tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang seperti yang diisyaratkan dalam perundang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah yang merupakan penjelasan dari Undang-undang perkawinan.

Hukum Islam hanya menekankan bahwa perkawinan itu sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan dalam rukun dan syarat perkawinan itu sendiri tidak menentukan mengenai pencatatan perkawinan.

Undang-undang Perkawinan tidak mengenal istilah perkawinan yang dilakukan secara dibawah tangan, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan dari pejabat yang berwenang dinyatakan tidak sah.

> Poligami dalam hukum Islam diperbolehkan namun dibatasi maksimal empat orang isteri. Sedangkan dalam hukum



positif di Indonesia sendiri, poligami tidak ada penyebutan secara jelas, hanya Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami yang bisa dikatakan terbuka karena di dalam Undang-undang Perkawinan itu juga masih dapat dimungkinkan untuk memiliki isteri lebih dari satu.

> Pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal buruk yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak dan juga pihak ketiga seperti anak dari hasil perkawinan tersebut.

> Pencatatan keempat perkawinan Syamsuddin tidak dapat dicatatkan secara bersama-sama. Pencatatan tersebut harus dilakukan satu-persatu dan diikuti dengan persyaratan-persyaratan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku.

## ***2. Saran***

Hendaknya pemerintah lebih gencar dalam mensosialisasikan dalam bentuk pengarahan dan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat khususnya mereka yang jelas-jelas buta terhadap perundang-undangan, khususnya perundang-undangan tentang perkawinan.